



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TENTANG

### **PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA SE-SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan program bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan keuangan kecamatan, kelurahan dan desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA SE-SULAWESI.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang peruntukan dan penggunaannya berpedoman pada Peraturan ini.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dan Desa.

## **BAB II KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

Kebijakan Bantuan Keuangan diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa berupa Dana Bantuan Operasional dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan secara sinergi dengan program bantuan ditingkat Kabupaten / Kota;
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan peruntukan bantuan dan besaran insentif bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

## **BAB III PENGANGGARAN APBD**

### **Pasal 4**

- (1) Melalui APBD Provinsi setiap tahun anggaran memberikan bantuan keuangan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota ;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan sebesar Rp.15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) / tahun.
  - b. Kelurahan dan Desa masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) / tahun.

**BAB IV**  
**PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN RINCIAN**  
**PENGGUNAAN ANGGARAN**

**Pasal 5**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa ditransfer melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota setelah laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- (2) Rincian penggunaan Biaya Operasional Dana Bantuan Keuangan sebagai berikut :
  - A. Pemerintahan Desa  
Biaya Operasional Pemerintah Desa dan unsur lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun sebagai berikut :
    - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-
    - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.500.000,-
    - c. Pengurus BPD sebesar Rp. 1.500.000,-
    - d. Pengurus LPM sebesar Rp. 1.500.000,-
    - e. Bendahara Desa sebesar Rp. 750.000,-
    - g. Petugas KB Bahteramas terdiri dari :
      - Pembantu Pembina KB Desa sebesar Rp. 500.000,-
    - h. Bidan Desa sebesar Rp. 500.000,-
    - i. Imam Desa 1 (satu) orang atau Petugas Agama lain Rp. 1.500.000,-
    - j. Para Kepala Dusun desa atau sebutan lain sebesar Rp. 1.500.000,-
    - k. ATK dan pelaporan sebesar Rp. 500.000,-
    - l. Biaya makan minum rapat sebesar RP. 750.000,-
    - m. Perjalanan Dinas unsur Pemerintah Desa Rp. 2.500.000,-. Penggunaannya berpedoman pada Peraturan/Keputusan Bupati masing-masing.
  - B. Pemerintahan Kelurahan  
Biaya Operasional Kelurahan dan unsur lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun sebagai berikut :
    - a. Lurah sebesar Rp. 2.000.000,-
    - b. Sekretaris Kelurahan sebesar Rp. 1.500.000,-
    - c. Pengurus LPM sebesar Rp. 1.500.000,-
    - d. Bendahara Kelurahan sebesar Rp. 750.000,-
    - e. Petugas KB Bahteramas terdiri dari :
      - Pembantu Pembina KB Kelurahan sebesar Rp. 500.000,-
    - f. Bidan Kelurahan sebesar Rp. 500.000,-
    - g. Imam Mesjid / Petugas Agama lain Sebesar Rp. 1.500.000,-
    - h. ATK dan pelaporan Sebesar RP. 500.000,-

- i. Biaya makan minum rapat sebesar Rp. 750.000,-
  - j. Para Ketua RW/RT Kelurahan atau sebutan lain Sebesar Rp. 3.000.000,-
  - k. Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Kelurahan sebesar Rp.2.500.000,- Penggunaannya berpedoman pada Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota masing-masing.
- C. Pemerintahan Kecamatan
- Biaya Operasional Pemerintah Kecamatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun :
- a. Camat sebesar Rp. 2.500.000,-
  - b. Sekretaris Camat Sebesar Rp. 2.000.000,-
  - c. Kepala Seksi PMD atau sebutan lain Sebesar Rp. 1.500.000,-
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Sebesar Rp. 1.250.000,-
  - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Sebesar Rp. 1.250.000,-
  - f. Kepala Seksi Pemerintahan Sebesar Rp. 1.250.000,-
  - g. Bendahara Sebesar Rp. 1.000.000,-
  - h. ATK dan pelaporan sebesar Rp. 500.000,-
  - i. Biaya makan minum rapat Sebesar Rp. 750.000,-
  - j. Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Kecamatan sebesar Rp 3.000.000,- untuk pembinaan ke Desa/Kelurahan. Penggunaannya berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Camat, Lurah dan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Bupati/Walikota melalui Bendahara Umum Daerah ( BUD ) dan tembusannya disampaikan pada BPMPD Kabupaten / Kota dan BPMPD Provinsi sebagai bahan rekomendasi pencairan tahun anggaran berikutnya;
- (2) BPKAD / Bagian Keuangan Kabupaten / Kota menyampaikan Rekapitulasi pencairan dana / penyaluran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui BPKAD
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

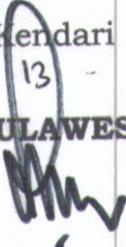
**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
N a m a	Jabatan	Paraf
1 H. SARIFUDDIN SAFAA SHAM	ASS I	
2		
3 DRS. H. MUH. ARFAH.	KA. BPMPD	
4 EFFENDI KALIKUNDIRI SHIMH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 13 - 6 - 2016  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

  
**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 13 - 6 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA**

**LUKMAN ABUNAWAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016  
NOMOR : 22**